

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Ethiopia, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Demokratik Federal Ethiopia, beribu kota di Addis Ababa. Ethiopia memiliki sistem pemerintahan parlementer dengan kepala negara dipegang oleh presiden dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Wilayah Ethiopia secara keseluruhan mencakup wilayah pegunungan dan dataran tinggi yang luas yang dipisahkan oleh Lembah Celah Besar, yang membentang dari utara ke selatan Ethiopia. Karena Ethiopia adalah negara merdeka tertua di Afrika, ia memiliki sejarah yang panjang dan gemilang. Negara Ethiopia didirikan berdasarkan konsep etnonasionalisme, yang berarti hampir setiap kelompok etnis menguasai wilayahnya sendiri, dan di Afrika, Ethiopia adalah satu-satunya negara yang tidak pernah diinvasi oleh negara lain. Oleh karena itu, konflik internal antar suku selalu menimbulkan tantangan. Wilayah etnis ini dan wilayah etnis lainnya terkadang mengalami konflik.<sup>1</sup>

Konflik tersebut berasal dari upaya Perdana Menteri Abiy Ahmed untuk menjauhkan politik negara dari federalisme etnis, yang memberikan penentuan nasib sendiri kepada kelompok etnis individu yang telah terpinggirkan sebelumnya. Abiy Ahmed membubarkan dan menggabungkan Front Demokrasi Revolusioner Rakyat Ethiopia (EPRDF), sebuah koalisi dari 4 partai berbasis etnis yang telah memerintah Ethiopia selama 30 tahun sebelum dia berkuasa, menjadi satu partai yang disebut Partai Kemakmuran. Namun, Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF), anggota utama koalisi sebelumnya, menolak untuk bergabung dengan partai baru tersebut, sehingga menimbulkan ketegangan di antara keduanya. Perselisihan meningkat saat pemilihan umum di Tigray diadakan pada bulan September bertentangan dengan pemerintah federal, yang telah menunda pemilihan nasional karena Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Ibid*

<sup>2</sup> BBC 29 June 2021 Ethiopia's Tigray war: The short, medium and long story. Diakses pada 27 Agustus 2024.

Penyebab langsung dari konflik tersebut adalah dugaan serangan pada tanggal 4 November 2020, yang diluncurkan oleh pasukan keamanan regional Tigray di markas Komando Utara Pasukan Pertahanan Nasional Ethiopia (ENDF) milik pemerintah Ethiopia.

Dua dekade sebelumnya saat Ethiopia dipimpin oleh Tigray memang sudah berlangsung perang panjang dengan negara tetangganya yaitu Eritrea. Perang itu dilandasi oleh masalah perbatasan wilayah Eritrea dengan Ethiopia. Tertuang dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa hadir untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional serta untuk memajukan dan memperkuat penghormatan terhadap kebebasan mendasar dan hak asasi manusia bagi semua orang, tanpa memandang ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama, menurut Pasal 1. Dendam dahulu Eritrea jadi pemicu ikut sertanya tentara Eritrea menginvasi Tigray. Sekarang terjadi kasus pelanggaran ham di Tigray, kekerasan sexual serta kelaparan menjadi alat perang disana. Stabilitas keamanan nasional di Ethiopia terganggu akibat konflik berkepanjangan. Kondisi ini sungguh memilukan sehingga menyebabkan krisis kemanusiaan serta dominasi politik disana. Konflik yang terjadi di Afrika Timur ini sudah berlangsung lama dikarenakan perselisihan antar pihak yang bersangkutan karena wilayah, sentiment antar etnis, dan permasalahan politik yang berlarut-larut terbengkalai.<sup>3</sup>

Konflik tersebut berlangsung karena ketidakpuasan Tigray terhadap hasil pemilihan umum yang akhirnya menetapkan Abiy Ahmed menjadi Perdana Menteri di Ethiopia pada april 2018. Abiy Ahmed merupakan seorang mantan intelegen tentara Ethiopia dia mendapatkan nobel perdamaian di Norwegia pada tahun 2019 karena inisiatifnya mengakhiri perang Ethiopia dengan Eritrea. Dia membebaskan tahanan politik musuh dan disambut baik Presiden Eritrea. Sebelumnya selama hampir 30 tahun sudah Ethiopia dipimpin oleh orang-orang yang mayoritasnya masyarakat Tigray Setelah Abiy naik dia memecat seluruh pejabat Tigray dengan tuduhan korupsi dan pelanggaran ham yang dilakukan selama mereka berkuasa. Stabilitas keamanan kala Ethiopia masih dipimpin oleh

---

<sup>3</sup> Krisis Tigray di Ethiopia: Apa yang terjadi? - penjelasan dalam versi pendek, sedang, dan panjang, BBC (20/11/2020) diakses pada febuari 15 2024

orang Tigray terjaga tetapi faktanya memang terjadi beberapa pelanggaran ham serta krisis demokrasi disana. Ethiopia menyerang Tigray dengan alasan kamp-kamp militer federal Ethiopia diserang oleh Tigray.<sup>4</sup>

Konflik di wilayah Tigray, Ethiopia, yang meletus pada November 2020, menandai awal dari krisis kemanusiaan yang sangat memprihatinkan di kawasan tersebut. Konflik ini berawal dari ketegangan politik yang sudah lama membara antara pemerintah federal Ethiopia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abiy Ahmed dan Tigray People's Liberation Front (TPLF), partai politik yang dominan di wilayah Tigray. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika pemerintah Ethiopia melancarkan operasi militer terhadap TPLF setelah menuduhnya melakukan serangan terhadap pangkalan militer federal. Akibat dari eskalasi ini, lebih dari 10.000 orang kehilangan nyawa, sekitar 2,2 juta orang terpaksa mengungsi di dalam negeri, dan lebih dari 60.000 orang melarikan diri ke Sudan sebagai pengungsi. Laporan yang kredibel juga menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk pembunuhan massal, kekerasan seksual, penahanan sewenang-wenang, dan pemindahan paksa penduduk.

Selama konflik di Ethiopia antara pemerintah federal yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abiy Ahmed dan wilayah Tigray yang didominasi TPLF, banyak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terungkap sehingga berujung pada krisis kemanusiaan. Mulai dari pembunuhan dan penembakan warga sipil yang dilakukan kedua belah pihak hingga penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata untuk mengusir lawan, konflik antara Ethiopia dan Tigray telah menarik perhatian dunia, khususnya organisasi UNHRC, karena pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kedua belah pihak kedua partai politik serta masuknya pengungsi dalam dan luar negeri. Selain itu, membantu Eritrea dengan mengirimkan pasukannya untuk mendukung kekuatan militer pemerintah federal bukan lagi urusan internal.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Irma Setiani, Zulfikri Suleman. (2021) "Kepemimpinan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed dalam Mewujudkan Perdamaian Ethiopia dan Eritrea. Sriwijaya Journal of Internasional Relations. Vol.1 No 2. Hal 20-36

<sup>5</sup> Lumintosari, Feyza Raharsh. "Peran Unchr Dalam Permasalahan Pengungsi." Global Mind Vol.3 No.2 (2021): 48-58

Konflik di wilayah Tigray, Ethiopia, yang meletus pada November 2020, menandai awal dari krisis kemanusiaan yang sangat memprihatinkan di kawasan tersebut. Konflik ini berawal dari ketegangan politik yang sudah lama membara antara pemerintah federal Ethiopia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Abiy Ahmed dan Tigray People's Liberation Front (TPLF), partai politik yang dominan di wilayah Tigray. Ketegangan ini mencapai puncaknya ketika pemerintah Ethiopia melancarkan operasi militer terhadap TPLF setelah menuduhnya melakukan serangan terhadap pangkalan militer federal. Akibat dari eskalasi ini, lebih dari 10.000 orang kehilangan nyawa, sekitar 2,2 juta orang terpaksa mengungsi di dalam negeri, dan lebih dari 60.000 orang melarikan diri ke Sudan sebagai pengungsi. Laporan yang kredibel juga menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk pembunuhan massal, kekerasan seksual, penahanan sewenang-wenang, dan pemindahan paksa penduduk.

Banyak orang melarikan diri dari konflik bersenjata antara pemerintah Federal Etiopia dan Tigray, khususnya warga Tigray yang terpaksa tinggal di kamp pengungsi setelah pemerintah Etiopia menutup wilayah mereka. Banyak di antara mereka yang mengalami luka fisik, bahkan ada yang menyaksikan pembunuhan, yang mungkin menimbulkan trauma. Menurut perkiraan PBB, setidaknya 31.000 warga Etiopia telah mengambil keputusan untuk meninggalkan negara mereka, dan 45% dari jumlah tersebut adalah generasi muda. Kondisi yang meresahkan juga dapat ditemukan di kamp-kamp pengungsian, di mana fasilitas yang ditawarkan hanyalah selimut, air untuk keperluan sehari-hari, dan bahan makanan seperti oatmeal, namun tempat tidur, toilet, dan kamar mandi yang memadai masih kurang. Mayoritas dari mereka datang hanya dengan pakaian yang mereka kenakan, meninggalkan rumah, harta benda, dan bahkan kerabat mereka. Warga sipil menjadi korban akibat konflik yang sedang berlangsung; banyak serangan artileri menargetkan daerah pemukiman umum daripada sasaran militer tertentu. Pembantaian, penjarahan, penyerangan seksual, dan penculikan juga berdampak pada warga sipil. Hingga Oktober 2021, telah terjadi 11.516 kematian warga sipil dan 283 kejadian pembantaian. Selain itu, telah terjadi kerusakan pada rumah-rumah dan bangunan-bangunan umum, gangguan terhadap layanan kesehatan, dan

kerusakan pada harta benda penduduk.<sup>6</sup>

Geopolitik Ethiopia juga memainkan peran penting dalam konflik ini. Sebagai negara terbesar kedua di Afrika berdasarkan jumlah penduduk, Ethiopia memiliki posisi strategis di Tanduk Afrika, sebuah wilayah yang rentan terhadap ketidakstabilan politik dan konflik. Ethiopia berbatasan dengan negara-negara yang juga memiliki sejarah konflik, seperti Somalia, Eritrea, dan Sudan. Konflik di Tigray telah menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya ketidakstabilan di kawasan tersebut. Hubungan Ethiopia dengan negara tetangganya, khususnya Eritrea, yang pernah menjadi musuh lama namun kini menjadi sekutu dalam konflik Tigray, juga mempengaruhi dinamika geopolitik. Selain itu, ketegangan dengan Sudan terkait sengketa perbatasan dan pembangunan Bendungan Renaisans Besar Ethiopia (GERD) di Sungai Nil memperumit situasi geopolitik.<sup>7</sup>

Di antara negara-negara Afrika yang saat ini sedang menghadapi masalah politik adalah Ethiopia. Ethiopia, juga dikenal sebagai Republik Demokratik Federal Ethiopia, adalah satu-satunya negara di Afrika yang belum pernah dijajah dan termasuk negara tertua di benua tersebut. Ethiopia berbatasan langsung dengan beberapa negara, termasuk Eritrea di utara, Kenya di selatan, Sudan dan Sudan Selatan di barat, serta Somalia dan Djibouti di timur. Dengan populasi sekitar 109 juta pada tahun 2019, Ethiopia adalah negara terbesar dan terpadat kedua di Tanduk Afrika. Ethiopia adalah suatu negara penerima pengungsi di kawasan Afrika dengan kebijakan pintu terbuka dan akses bantuan kemanusiaan bagi pencari suaka dan perlindungan di kawasan Ethiopia. Krisis kemanusiaan telah mendorong munculnya upaya penyelesaian berbagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya akibat kejahatan massal atau perang bersenjata dalam sistem negara regional dan internasional.

Kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama konflik bersenjata di Tigray.

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Bernadeta Nindhita Herdianti, Hermi Susiatiningsih (2023). Kegagalan Amerika Serikat dan Bank Dunia dalam Upaya Menyelesaikan Konflik Bendungan GERD. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol.16, No. 2. Hal 304-322

Pasal 5, 7, dan 8 Statuta Roma tahun 1998 mencantumkan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius. Kejahatan terhadap kemanusiaan, menurut Pasal 7, meliputi pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, dan pemusnahan. Peristiwa tersebut terjadi di tengah keberhasilan perjuangan Tigray. Menurut Statuta Roma, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Banyak kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan warga sipil, penahanan mereka, pelanggaran seksual, penghancuran bangunan sipil, dan pelanggaran lain yang tercantum dalam Konvensi Jenewa, telah terjadi selama konflik di Tigray. Orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini telah melanggar ketentuan Statuta Roma tahun 1998 tentang pelanggaran hak asasi manusia, serta persyaratan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I dan II.

Masalah penghormatan terhadap hak-hak individu dalam menghadapi kejahatan massal sudah ada sejak lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pembukaan Deklarasi Universal menjelaskan bahwa penghinaan dan ejekan terhadap hak asasi manusia berbentuk tindakan biadab yang bertentangan dengan hati nurani umat manusia. Oleh karena itu, deklarasi tersebut menjanjikan sebuah dunia di mana makhluk hidup menikmati kebebasan berbicara dan berkeyakinan serta bebas dari rasa takut. Cara untuk mencapai tujuan perlindungan hak asasi manusia adalah melalui peraturan hukum.<sup>8</sup>

Respon pemerintah Ethiopia terhadap krisis ini sangat beragam dan kompleks. Di satu sisi, pemerintah Ethiopia, di bawah pimpinan Perdana Menteri Abiy Ahmed, awalnya menganggap operasi militer di Tigray sebagai "operasi penegakan hukum" yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban dan stabilitas. Pemerintah juga berulang kali menegaskan komitmennya untuk melindungi warga sipil dan menolak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas. Namun, di sisi lain, ada laporan bahwa pemerintah Ethiopia membatasi akses kemanusiaan ke

<sup>8</sup> Yuniarti. "Pelaksanaan Prinsip Responsibility to Protect PBB Dalam Penanganan Krisis Kemanusiaan Di afrika (Republik Afrika Tengah, Sudan dan Nigeria (2021)". *Jurnal Sosialpolitika* Vol.2, No.1 (Juli 2021): 17-30.

wilayah Tigray, menghalangi distribusi bantuan, dan mempersulit investigasi independen terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Langkah-langkah ini mengundang kritik dari komunitas internasional dan memperburuk situasi kemanusiaan di lapangan.

Daniel Bekele, Ketua Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia Ethiopia, menyatakan bahwa penyelidikan bersama ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas. Menurutnya, "Pelaporan independen dan kolaboratif seperti ini adalah langkah penting untuk mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi di Tigray dan untuk memastikan bahwa para pelaku kejahatan bertanggung jawab atas tindakan mereka." Bekele menekankan pentingnya dukungan internasional untuk menekan pihak-pihak yang terlibat agar menghormati hak asasi manusia dan memfasilitasi akses bantuan kemanusiaan.<sup>9</sup>

Organisasi internasional merupakan salah satu aktor dalam kajian hubungan internasional dan dalam perkembangannya mempunyai peranan penting dalam kancah politik internasional. Peran organisasi internasional juga kompleks karena mereka dapat menjadi forum dimana aktor lain, termasuk negara, organisasi dan individu, dapat bersaing. Organisasi internasional juga dapat menjadi aktor independen dan bersaing yang dapat menerapkan nilai, norma, dan aturan mereka dalam komunitas internasional. Cliver Archer dalam bukunya *An Pengantar Hubungan Internasional* karya Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani menjelaskan bahwa organisasi internasional berasal dari kata organisasi dan internasional, yang kemudian diartikan sebagai suatu struktur formal dan keberlanjutan yang terbentuk berdasarkan kesepakatan para anggota internasional. organisasi. organisasi pemerintah dan non-pemerintah, yang terdiri dari dua atau lebih anggota dengan tujuan mencapai kesejahteraan umum.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Implementation of the Recommendation of the Joint Investigation Report of EHRC and OHCHR on the Tigray Conflict : <https://ehrc.org/stakeholders-consultation-to-support-the-implementation-of-the-recommendations-of-the-joint-investigation-report-of-ehrc-and-ohchr-on-the-tigray-conflict/>

<sup>10</sup> Anak Agung Banyu Perwita, Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005. Hal, 92.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sebagai aktor hubungan internasional, komisi HAM PBB atau UN Human Right Council memiliki peranan penting dalam menangani krisis kemanusiaan di Ethiopia terkait konflik Tigray. Krisis kemanusiaan akibat konflik Tigray semakin meningkat setelah di indikasi pelanggaran HAM dan kejahatan perang. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini ialah ” **Bagaimana Peran United Nations Human Right Council (UNHRC) dalam menangani Krisis Kemanusiaan dan Memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia akibat konflik Tigray di Ethiopia?**

## 1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu :

- a. Diperlukan sebuah tindakan UNHRC untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi terkait konflik diTigray.
- b. Terjadinya krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh konflik diTigray menyebabkan berbagai kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang, sehingga korban akibat konflik berjatuh.

## 1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan, sehingga tidak terlalu luas dalam membahas penelitian ini. Karena dalam konflik tigray terjadi banyak pembunuhan, pemerkosaan, pemusnahan dan perbudakan di Tigray mengakibatkan kesengsaraan serta korban yang berjatuh semakin bertambah dari masyarakat sipil, maka dibutuhkan peran dari UNHRC yang menaungi HAM masyarakat tigray dari rasa takut yang terjadi akibat konflik yang berkepanjangan tersebut. Untuk itu dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada Peran UNHRC dalam menangani Krisis Kemanusiaan terkait konflik Tigray 2020-2021.

## 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah penulis melihat dampak dan mengevaluasi efektivitas peran Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani krisis kemanusiaan yang terjadi selama konflik di Tigray, Ethiopia pada tahun 2020-2021. Penelitian ini pun bisa bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan dan rekomendasi untuk meningkatkan respons di masa depan terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia dan krisis kemanusiaan yang terjadi di dunia agar terciptanya perdamaian untuk manusia.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memluas dan memperkaya pemahaman tentang konsep-konsep yang digunakan dalam studi hubungan internasional untuk menyelesaikan konflik dan mendukung para korban yang terdampak konflik dengan menerapkan peran United Nation Human Rights Council (UNHRC) sebagai Badan Hak Asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan terkait konflik dan menjunjung tinggi nilai HAM di dunia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai peran dan tanggung jawab UNHRC dalam menangani Krisis kemanusiaan konflik di Tigray, Ethiopia.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan informasi dan referensi bagi para pengamat masalah-masalah internasional, terutama bagi peneliti dalam ilmu hubungan internasional yang tertarik pada Krisis Kemanusiaan, United Nation Human Rights Council (UNHRC) dan Kejahatan Internasional. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan tambahan dan bahan kajian lebih lanjut bagi Ilmu Hubungan Internasional.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Dalam menyusun penelitian ini penulis membuat sistematika penulisan yang akan diuraikan sebagai berikut :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis membahas latar belakang, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini, penulis menguraikan penelitian terdahulu, kerangka teori dan konsep yang relevan dengan penelitian ini, serta kerangka pemikiran.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan, paradigma konstruktivisme, pendekatan kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data.

## **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL**

Pada bab ini, penulis akan menganalisa peranan organisasi internasional UN Human Rights Council yang termasuk ke dalam teori organisasi internasional milik Cliver Archer, serta menganalisa upaya-upaya yang telah dilakukan UN Human Rights Council dalam bentuk kerjasama internasional untuk menanggapi krisis kemanusiaan yang di alami oleh masyarakat Ethiopia akibat konflik Tigray.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, merupakan bab terakhir dalam penelitian ini dimana penulis akan memaparkan kesimpulan dari hasil yang telah ditemukan. Serta akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sekaligus memberikan saran terhadap penelitian yang akan datang dan diharapkan akan berguna bagi peneliti-peneliti lain nya